

PERGESERAN KEKUASAAN NEGARA DAN RELASI ANTARSUBJEK DALAM CERPEN ORDE BARU DAN REFORMASI

Akhmad Rizqi Turama

Alumni Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya

Email: a.rizqiturama@gmail.com

Abstrak

Masalah dalam makalah ini adalah bagaimana perspektif kekuasaan negara dan relasi antarsubjek dalam cerpen “Godlob” karya Danarto dan “Clara” karya Seno Gumira Ajidarma. Cerpen pertama merupakan perwakilan dari zaman Orde Baru sedangkan cerpen kedua merupakan perwakilan dari era reformasi. Penelitian ini menggunakan dua teori, yakni teori hegemoni Gramsci dan teori kekuasaan Foucault. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada pergeseran instrumen hegemoni negara, pergeseran wacana militer, pergeseran wacana lembaga negara, dan pergeseran relasi antarsubjek dari zaman Orde Baru ke era reformasi.

Kata kunci: cerpen, Orde Baru, Reformasi, Gramsci, Foucault.

Abstract

The focus in this paper is how the state power's perspective and inter subject relation in Danarto's "Godlob" and Seno Gumira Ajidarma's "Clara". The first short story is the representation of Orde Baru while the second is the representation of reformation era. This paper uses two theories, Gramsci's idea about Hegemony and the Foucault's notion about power. The result of this research shows that there are changes in state hegemonic instrument, military discourse, state institute discourse, and inter subject relation from the Orde Baru to the reformation era.

Keywords: short story, Orde Baru, Reformation, Gramsci, Foucault.

Pendahuluan

Sebagaimana dipahami dan dirasakan oleh semua orang, runtuhnya rezim Soeharto telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi, budaya, maupun pandangan hidup, sehingga membentuk kondisi yang kini disebut sebagai era demokrasi. Karya sastra, sebagai produk kebudayaan, tak dapat dilepaskan dari efek tersebut, bahkan dalam beberapa perannya karya sastra justru menjadi medium intervensi atas sikap otoriter pemerintah. Menempatkan karya sastra dalam posisi demikian merupakan hal yang konkret dan relevan. Eagleton (2002: 7) secara tegas menyatakan bahwa karya sastra adalah bentuk-bentuk persepsi, cara khusus dalam memandang dunia, dan juga memiliki relasi dengan cara memandang realitas yang menjadi mentalitas atau ideologi sosial suatu zaman.

Posisi demikian membuka hipotesis awal bahwa karya sastra secara otomatis selalu berdiskusi dengan zamannya. Dinamika,

baik dalam tataran tekstual, gagasan, maupun gaya estetik penceritaan, akan selalu muncul dan mengalami perubahan. Terkait konteks spesifiknya, perubahan situasi dari era Orde Baru menuju Reformasi tentu memiliki konsekuensi logis terhadap karya sastra di kedua zaman itu. Orde Baru dipahami identik dengan kekuasaan negara, sementara Reformasi identik dengan era keterbukaan, mengabaikan kekuasaan negara, dan bergerak menuju otonomi subjek. Bertolak dari kondisi tersebut, dalam kesempatan ini akan dibuktikan bagaimana perubahan yang muncul di kedua zaman itu dalam karya sastra, khususnya cerpen. Pembahasan ini akan berfokus pada problem kontekstual, yakni persoalan wacana kekuasaan: dominasi negara dan kedudukan subjek. Oleh karena itu, secara spesifik digunakan teori Hegemoni Gramsci dan Teori Kekuasaan Foucault untuk mendekati persoalan.

Teori Hegemoni Gramsci dalam hal ini dipahami untuk membahas kekuasaan negara, sementara teori Foucault dipahami untuk membahas kedudukan dan kekuasaan subjek.

Melalui penjelasan tersebut diasumsikan akan dihasilkan suatu perbandingan deskriptif yang dalam tingkatannya akan menghasilkan suatu kesimpulan mengenai bentuk perubahan sifat kekuasaan yang dominan dari karya sastra Orde Baru dan Reformasi. Untuk itu, dalam penelitian ini digunakan objek material yang sungguh-sungguh merepresentasikan konteks zamannya.

Melalui metode pembacaan dekat, dengan menempatkan teks-teks tersebut dalam konteks penciptaan sesuai dengan intensi pengarang dan konteks historis yang melatarbelakangi waktu penciptaan, dipilihlah dua cerpen sebagai objek penelitian, yakni cerpen “Godlob” karya Danarto sebagai representasi era Orde Baru dan cerpen “Clara” karya Seno Gumira Ajidarma sebagai representasi era Reformasi. Kedua cerpen tersebut memiliki kandungan wacana kekuasaan yang dominan sehingga mampu menunjukkan bentuk perubahan relasi kekuasaan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang ini, dapat dikatakan bahwa penelitian ini sangat relevan dilakukan terkait dengan hasil kesimpulan penelitian yang mengarah pada pemahaman deskriptif dan spesifik atas perubahan dan sifat kekuasaan era Orde Baru dan Reformasi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan, yakni (1) Cerpen “Godlob” dalam perspektif kekuasaan negara dan relasi antarsubjek sebagai representasi Masa Orde Baru dan (2) Cerpen “Clara” dalam perspektif kekuasaan negara dan relasi antarsubjek sebagai representasi Era Reformasi.

Penelitian ini menggunakan dua kerangka berpikir, yakni teori Hegemoni Gramsci dan Teori Kekuasaan Foucault untuk mengetahui dan membahas perubahan dominasi sifat kekuasaan dari era Orde Baru ke Reformasi.

Teori Hegemoni Gramsci

Teori ini secara umum merupakan bentuk penyempurnaan dari teori Marx. Dalam pembicaraan sosiologi sastra, teori Marx mendapat posisi yang dominan dibanding teori lainnya. Marx mencetus teori yang dinamakan

materialisme historis. Inti teori ini adalah bahwa perkembangan masyarakat ditentukan oleh bidang produksi (Patria-Arief, 2003: 3). Marx percaya bahwa struktur sosial suatu masyarakat, juga struktur lembaga-lembaganya, moralitasnya, agamanya, dan kasusastraannya, ditentukan oleh kondisi-kondisi produktif kehidupan masyarakat itu. Dengan demikian, ia membagi masyarakat menjadi infrastruktur atau dasar ekonomik dan superstruktur yang dibangun di atasnya (Faruk, 2010:7). Hubungan antara superstruktur dengan infrastruktur, yakni hubungan yang tidak sejajar dimana superstruktur ditentukan oleh infrastruktur masyarakat yang berupa hubungan produksi.

Seni bagi Marxisme kemudian merupakan bagian dari “superstruktur” masyarakat. Seni merupakan bagian dari ideologi masyarakat—satu elemen dalam struktur persepsi sosial yang sangat rumit yang meyakinkan bahwa situasi dimana satu kelas sosial memiliki kekuasaan terhadap kelas-kelas lainnya yang juga dilihat oleh sebagian besar anggota masyarakat sebagai sesuatu yang “alamiah” atau tidak terlihat sama sekali (Eagleton, 2002: 6). Akan tetapi, Marx menganggap hubungan seni dengan struktur ekonomik masyarakatnya sebagai infrastruktur dipahami hanya dalam batas-batas kausalitas ekonomik yang ketat. Sebagai ideologi, seni dianggap tidak mempunyai otonomi sama sekali. Kehadirannya ditentukan oleh infrastruktur (Faruk, 2010:10). Bahkan Marx mengklaim dalam analisis terakhirnya bahwa seni ditentukan oleh modal produksi (Eagleton, 2002: 17).

Berbeda dengan kaum marxis ortodoks, Gramsci menganggap dunia gagasan, kebudayaan, superstruktur, bukan hanya sebagai refleksi atau ekspresi dari struktur kelas ekonomik atau infrastruktur yang bersifat material, melainkan sebagai salah satu kekuatan material itu sendiri (Faruk, 2010:131). Dengan demikian, Gramsci menganggap persoalan kultural dan formasi ideologis menjadi penting. Hal itu dikarenakan gagasan-gagasan dan opini-opini tidak lahir begitu saja dari otak individu, melainkan punya pusat informasi, iradiasi, penyebaran, dan persuasif. Puncak tersebutlah yang oleh Gramsci disebut

sebagai hegemoni (Faruk, 2010: 132).

Secara literer, hegemoni berarti “kepemimpinan”. Lebih sering kata itu digunakan oleh para komentator politik untuk menunjuk pengertian dominasi. Akan tetapi, bagi Gramsci, konsep hegemoni berarti sesuatu yang lebih kompleks. Gramsci menggunakan konsep itu untuk meneliti bentuk-bentuk politik, kultural, dan ideologis tertentu, yang lewatnya, dalam suatu masyarakat yang ada, suatu kelas fundamental dapat membangun kepemimpinannya sebagai sesuatu yang berbeda dari bentuk-bentuk dominasi yang bersifat memaksa (Faruk, 2010: 132).

Pandangan Gramsci mengenai pentingnya kepemimpinan kultural membuatnya mempertimbangkan kembali konsep “superstruktur” dari Marxian (Sugiono, 2006: 34). Ia kemudian mengembangkan konsep tersebut sesuai dengan kategori hegemoni. Hal itu membuatnya memilah pengertian superstruktur menjadi “dua level struktur utama”: tingkat pertama ia sebut “masyarakat sipil,” lainnya adalah “masyarakat politik” atau “negara” (Gramsci, 1971: 12).

Bagi Gramsci, kedua level superstruktur tersebut merepresentasikan dua ranah yang berbeda, yaitu ranah persetujuan dalam hal masyarakat sipil dan ranah kekuatan dalam hal masyarakat politik (Sugiono, 2006: 35). Kedua alat ini digunakan untuk melegitimasi kekuasaan kelas penguasa agar terus menguasai kelas yang dikuasainya. Kedua level ini pada satu sisi berkaitan dengan fungsi hegemoni dimana kelompok dominan menangani keseluruhan masyarakat, dan di sisi lain berkaitan dengan ‘dominasi langsung’, atau perintah yang dilaksanakan di seluruh negara dan pemerintahan”yuridis” (Gramsci, 1971:12). Akan tetapi, ranah yang kedua, yakni ranah kekuasaan dengan cara dominasi langsung oleh Gramsci disyaratkan penggunaannya hanya sebagai pilihan terakhir.

Melihat pengertian-pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa hegemoni pada intinya merupakan suatu alat untuk berkuasa dengan cara-cara yang bersifat “damai”. Sebuah

organisasi konsensus yang dapat diartikan sebagai suatu relasi, bukan terdiri dari dominasi dengan jalan kekuatan, melainkan persetujuan melalui kepemimpinan politis dan ideologis (Simon, 1982: 21).

Proses penguasaan secara hegemoni dapat dilakukan dengan cara menyebarkan ideologi. Menurut Gramsci, penyebaran itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui lembaga-lembaga sosial tertentu yang menjadi pusatnya, misalnya bentuk-bentuk sekolahan dan pengajaran, kematangan dan ketidakmatangan relatif bahasa nasional dan sebagainya. Pusat-pusat itu bersifat fungsionaris, yang mempunyai peranan penting yaitu mereka kaum intelektual (Faruk, 2010:150). Kaum intelektual ialah mereka yang aktivitas intelektualnya diarahkan untuk memproduksi dan menyebarkan filsafat, teori politik maupun teori ekonomi sebagai sebuah pandangan dunia yang koheren guna mencapai dan memelihara “hegemoni sosial dan pemerintahan politik” (Gramsci, 1971: 12).

Dalam teori Gramsci, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni pertama Gramsci berpendapat bahwa di dalam masyarakat selalu ada bermacam-macam ideologi. Kedua, konflik tidak hanya terjadi antarkelas, tetapi juga terjadi antara kelompok-kelompok dengan kepentingan global untuk mendapatkan kontrol ideologi dan politik terhadap suatu masyarakat. Ketiga, untuk menjadi kelompok penguasa, kelompok tersebut harus mewakili kepentingan umum agar konsensus dicapai dengan persetujuan. Hal itu dapat dibentuk melalui superstruktur, salah satunya adalah karya sastra.

Teori Kekuasaan Foucault

Dalam membahas konsep kekuasaan, Foucault menjelaskan bahwa filsafat politik tradisional selalu berorientasi pada legitimasi. Kekuasaan adalah sesuatu yang dilegitimasi secara metafisis oleh negara, yang memungkinkan negara dapat mewajibkan semua orang untuk mematuhi. Selain itu, kekuasaan sering dipahami dalam pengertian negatif dan dilihat terutama sebagai mekanisme peradilan: yang mendasari hukum, membatasi, menghalangi,

menolak, melarang, dan menyensor. Kekuasaan mengandaikan penguasa berhak melarang (Sarup, 2011:111). Sementara kekuasaan modern bekerja melalui konstruksi kapasitas dan mode aktivitas “baru”, bukan melalui pembatasan terhadap apa yang ada sebelumnya.

Foucault mengatakan kekuasaan bukanlah kepemilikan ataupun kemampuan. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang tunduk pada atau melayani kepentingan ekonomi. Foucault menekankan bahwa pola hubungan kekuasaan tidak dapat dikonseptualisasikan sebagai milik individu atau kelas. Kekuasaan bukanlah komoditas yang dapat diperoleh atau diraih. Kekuasaan bersifat jaringan, menyebar luas ke mana-mana, sehingga kekuasaan bisa ditemukan dalam segala bidang interaksi manusia: keluarga, politik, ekonomi, sosial, agama, dan sebagainya. Penelitian Foucault tentang sejarah orang-orang gila, tentang mereka yang ditolak masyarakat, berhasil mengungkap formasi-formasi bahasa dan diskursus yang telah menciptakan konsep pihak lain (*the other*) untuk hal ini.

Dengan demikian, Foucault mengatakan bahwa analisis kekuasaan seharusnya tidak memusatkan perhatian pada tingkat tujuan sadar, tapi pada poin penerapan kekuasaan. Dengan kata lain, ia ingin mengubah titik perhatian dari pertanyaan, seperti ‘siapa yang memiliki kekuasaan?’, atau ‘apa tujuan atau maksud pemegang kekuasaan?’ ke proses-proses yang membentuk subjek sebagai hasil pengaruh kekuasaan (Sarup, 2011: 112).

Artinya, kekuasaan dipahami sebagai sebuah strategi yang berlangsung dimana-mana, dan di sana terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi. Kekuasaan ini tidak datang dari luar, melainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan, dan hubungan-hubungan dari dalam dan memungkinkan semuanya terjadi (Foucault, 2000: 144). Dengan demikian, kekuasaan merupakan sumber dari segala perilaku manusia dan merupakan bentuk korelasinya dengan orang lain. Melalui pengakuan dari struktur-struktur yang menjalankan fungsi tertentu itulah kekuasaan berasal. Tujuan gagasan kekuasaan sebagai suatu strategi dan

mekanisme berkuasa ialah membentuk setiap individu untuk memiliki dedikasi dan disiplin diri agar menjadi pribadi yang produktif sesuai dengan maksud dari kekuasaan tertentu.

Pembahasan

Relasi kekuasaan dalam cerpen “Godlob” karya Danarto dan “Clara” karya Seno Gumira Ajidarma dapat ditafsirkan memiliki ruang pemahaman yang berbeda. Hal ini bersumber dari konteks produksi karya sastra tersebut. Maka, apa yang diungkap Eagleton (2002:7) yang menyatakan bahwa karya sastra adalah bentuk-bentuk persepsi, cara khusus dalam memandang dunia; dan juga memiliki relasi dengan cara memandang realitas yang menjadi mentalitas atau ideologi sosial suatu zaman, memiliki relevansinya. Artinya, masyarakat adalah objek karya sastra. Perkembangan karya sastra tergantung perkembangan masyarakat. Kleden (2004: 45) mengungkap, sastra menggambarkan kecenderungan-kecenderungan utama dalam masyarakatnya, baik karena sebuah teks dengan sadar (atau tidak sadar) mengungkapkannya, maupun karena teks tersebut dengan sengaja (atau tanpa sengaja) mengelabuinya.

Di konteks yang lain, kekuasaan adalah wacana yang terus berkembang dalam dinamika sosial masyarakat. Karya sastra pun dinamis dalam menangkap realitas sosial yang berkembang. Artinya, ketika sastra berkembang, hubungan-hubungan sosial baru tercipta dan bersamanya lahir kebudayaan, perasaan, dan citra baru (Salamini dan Liftchitz, 2004: 179). Karya sastra diyakini merekam wacana tersebut melalui kreasi yang dilakukan pengarang. Namun, karena merupakan produk sejarah atau produk sosial, karya sastra harus dipandang sebagai konstruksi yang kompleks dari sejumlah faktor historis riil, bukan hanya sebagai kreasi genius pengarang (Budiman, 1995: 201).

Cerpen “Godlob” dan “Clara” diyakini memiliki persegeran pola kekuasaan. Pergeseran pola inilah yang menarik untuk dikaji. Di bawah ini, beberapa pola pergeseran kekuasaan yang sangat terlihat dalam kedua cerpen tersebut. Peneliti membaginya menjadi

dua perspektif pergeseran, yaitu pergeseran instrumen hegemoni negara dan pergeseran relasi antarsubjek.

Pergeseran Instrumen Hegemoni Negara

Bagi Gramsci, hegemoni selalu berhubungan dengan penyusunan kekuatan negara sebagai kelas diktator (Simon, 2004: 30). Hegemoni juga merujuk pada kedudukan ideologis satu atau lebih kelompok atau kelas dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari yang lainnya (Bellamy, 1990: 185). Artinya, ideologi menjadi instrumen penting sebelum menjelaskan mengenai hegemoni.

Erosi ideologi dari kelas yang berkuasa harus diikuti oleh penciptaan suatu ideologi baru, suatu sistem gagasan baru, sistem kepercayaan dan nilai-nilai baru. Intelektual berfungsi mengelaborasi kelompok ideologi dominan, memberikan keserasan akan ideologi itu, dan mentransformasikannya menjadi suatu konsep ideologi yang kemudian harus disebarkan kepada seluruh masyarakat. Intelektual model ini disebut intelektual organik, karena mereka membentuk suatu hubungan organik antara suatu kelas sosial dengan superstruktur. Intelektual organik berposisi dengan intelektual tradisional. Setiap kelompok yang mencoba meraih kekuasaan harus menyerap intelektual-intelektual tradisional untuk menyerang intelektual organik (Patria & Arief, 2003: 159–163).

Dalam pandangan Gramsci, proses konsensus dalam proses hegemoni harus dilakukan dalam berbagai cara. Menciptakan kepercayaan populer dan gagasan-gagasan yang serupa adalah caranya. Dalam hal ini yang terpenting, gagasan-gagasan itu tersebar sedemikian rupa, hingga mempengaruhi cara pandang seseorang tentang dunia (*via* Faruk, 2005:70). Dalam konteks cerpen “Godlob” dan “Clara”, gagasan tentang militerisme dan birokrasi sangat kental hadir dalam mempengaruhi persepsi tentang pandangan dunia dalam konteks hegemoni negara. Dalam pembahasan ini akan diungkap bagaimana proses pergeserannya.

Pergeseran Wacana Militer

Dari eksplorasi sebelumnya, kita bisa melihat bahwa “Godlob”, sebagai cerpen yang merepresentasikan Orde Baru, sangat kental akan wacana militerisme yang dominan. Fakta ini dapat dianalisis dari ruang wacana yang muncul, yaitu pemahaman konsep tentang makna pahlawan. Tokoh Ayah sangat terlihat menjadi representasi dari wacana negara karena dia menjadi instrumen bagi hegemoni wacana kekuasaan melalui perannya. Bagi sang ayah, citra pahlawan sebagai orang yang mati di medan perang adalah pemahaman yang dominan. Ambisinya yang ingin menjadikan anaknya pahlawan adalah buktinya. Dalam konteks ini, wacana negara tentang kepahlawanan menjadi poin penting. Pahlawan ditafsirkan hanya sebagai tentara yang meninggal di medan pertempuran. Ini jelas menjadi ruang bagi pengukuhan hegemoni negara terutama era Orde Baru yang memposisikan militer/tentara sebagai simbol kekuasaan.

Oleh karenanya, ketika dia ingin agar salah satu anaknya menjadi pahlawan, pilihannya adalah harus mati di medan perang. Kalau ternyata sang anak belum mati, maka membunuhnya adalah pilihan terakhir. Dalam konteks ini, gagasan kepahlawanan melalui perang adalah gagasan tentang militerisme. Gagasan tentang sebuah persepsi yang dominan, bahwa militer adalah pahlawan. Hal ini dapat dianalisis dari teks berikut.

“Apa maksud ayah sebenarnya?”
“Anakku. Aku ingin kau jadi pahlawan.”
“Ayah?”
...
“Anakku, maafkan ayahmu. Kau harus kubunuh?”
“Ayah! Dengan cara demikiankah ayah hendak menjadikanku pahlawan? Ayah menghalalkan? Aku dan ayah dua manusia” (Danarto, 1967).

Kondisi ini berbeda dengan cerpen “Clara” yang merupakan representasi Era Reformasi. Dalam cerpen “Clara”, relasi kekuasaan yang muncul justru sebaliknya. Militer tidak ditafsirkan sebagai wajah yang

dominan, tetapi justru mengalami proses reduksi kekuasaan. Hal ini dapat dianalisis dari ketidakmampuan polisi mengatur konflik sosial yang hadir. Bahkan, ketika Clara hendak meminta perlindungan karena merasa keamanannya terancam, sang polisi justru mengelak. Pola ini jelas mengidentifikasi kekuasaan polisi yang mengalami reduksi. Dari yang awalnya sebagai pihak yang seharusnya “menertibkan”, justru sekarang menjadi pihak yang “tidak bisa menertibkan”. Hal ini dapat dianalisis dari teks berikut.

”Jangan terlalu mudah menyebarkan isu diperkosa. Perkosaan itu paling sulit dibuktikan. Salah-salah kamu dianggap menyebarkan fitnah.”

Di matanya kemarahan terpancar sekejap. Bahwa dia punya nyali untuk bercerita, memang menunjukkan dia wanita yang tegar.

”Saya mau pulang,” ia berdiri. Ia hanya mengenakan kain yang menggantung di bahu. Kain itu panjangnya tanggung, kakinya yang begitu putih dan mulus nampak telanjang.

”Kamu tidur saja di situ. Di luar masih rusuh, toko-toko dibakar, dan banyak perempuan Cina diperkosa.”

”Tidak, saya mau pulang.”

”Siapa mau mengantar kamu dalam kerusuhan begini. Apa kamu mau pulang jalan kaki seperti itu? Sedangkan pos polisi saja di mana-mana dibakar.” Dia diam saja.

”Tidur di situ,” kutunjuk sebuah bangku panjang, ”besok pagi kamu boleh pulang” (Ajidarma, 1998).

Pergeseran Wacana Lembaga Negara

Ada pergeseran tentang persepsi lembaga negara. Lembaga negara ditafsirkan sebagai sekumpulan orang-orang yang memiliki otoritas tertentu. Dalam perkembangannya, lembaga inilah yang memiliki legitimasi kekuasaan dalam rangka melakukan hegemoni negara.

Dalam konteks cerpen “Godlob”, lembaga sejenis dewan yang memiliki otoritas dalam memberikan gelar pahlawan ini menjadi lembaga dominan. Dalam lembaga ini, terdapat politikus-politikus yang berhak memberikan gelar pahlawan bagi seseorang. Otoritas lembaga

ini terlihat nyata ketika memberikan gelar pahlawan kepada sang anak. Namun, munculah polemik, ketika sang ibu justru menggugat gelar pahlawan anaknya terhadap lembaga tersebut, hingga akhirnya memunculkan protes sang ayah.

“Dengan berpijak pada nilai-nilai objektif, akan tidak ada tipuan-tipuan,” kata para pembesar bersama-sama.

“Adakah nilai-nilai objektif? Semuanya adalah subjektif?”

“Apa yang diharapkan sekarang?” kata para pembesar bersama-sama.

Lalu laki-laki tua itu memandang berkeliling, menatap wajah demi wajah:

“Kalian orang-orang kecil, sekali-kali boleh pergi ke garis depan. Hingga kita bisa juga bicara tentang perang”

“Lihatlah sang politikus! Ia berbicara tentang negara, tentang perang, tentang ekonomi, tentang sajak, tentang kebun binatang, tentang perempuan. Sudah diborong semua. Lantas kita disuruh bicara tentang apa?” (Danarto, 2004).

Teks ini mensyaratkan kritik terhadap lembaga negara tersebut. Namun, kritik yang dilakukan masih bersifat kritik, bukan autokritik, yaitu kritik yang masih dilakukan oleh pihak luar terhadap lembaga tersebut. Meskipun demikian, akibat kritik tersebut laki-laki itu harus menerima kenyataan, yaitu mati terbunuh di tangan istrinya sendiri. Hal ini semakin mengukuhkan proses hegemoni yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

Proses ini sedikit berbeda ketika kita menghadirkan cerpen “Clara” sebagai pembandingan. Dalam cerpen ini, kita justru melihat proses autokritik hadir. Polisi yang seharusnya memperkuat kekuasaannya, melalui hegemoninya justru terpecah. Sang polisi justru mengkritik dirinya sendiri, sebagai representasi atas negara, dengan melaknatnya seperti seekor binatang dan robot. Hal ini dapat dianalisis dari teks berikut.

“Kulihat dia melangkah ke sana. Dalam cahaya lampu, lekuk tubuhnya nampak menerawang. Dia sungguh-

sungguh cantik dan menarik, meskipun rambutnya dicat warna merah. Rasanya aku juga ingin memperkosanya. Sudah kubilang tadi, barangkali aku seorang anjing, barangkali aku seorang babi — tapi aku mengenakan seragam. Kau tidak akan pernah tahu siapa diriku sebenarnya. Masalahnya: menurut ilmu hewan, katanya binatang pun tidak pernah memperkosa.

Tentu saja tentang yang satu ini tidak perlu kulaporkan kepada pimpinan. Hanya kepadamu aku bisa bercerita dengan jujur, tapi dengan catatan—semua ini rahasia. Jadi, jangan bilang-bilang” (Ajidarma, 1998).

“Jangan terlalu cepat percaya kepada perasaan. Perasaan bisa menipu. Perasaan itu subjektif. Sedangkan aku bukan subjek di sini. Aku cuma alat. Aku cuma robot. Taik kucing dengan hati nurani. Aku hanya petugas yang membuat laporan, dan sebuah laporan harus sangat terinci bukan?” (Ajidarma, 1998).

Pergeseran Relasi Antarsubjek

Dalam konteks ini, subjek menjadi subjek yang sadar, berkemauan, dan otonom. Pemahaman ini didasarkan pada apa yang diuraikan Foucault, bahwa kekuasaan tidak lagi bekerja melalui mekanisme dari atas-bawah, dimana penguasa menerapkan batasan-batasan yang koersif atas massa yang patuh. Lebih lanjut Foucault menjelaskan bahwa pola hubungan kekuasaan bersifat diferensial yang kompleks. Dirinya meluas ke setiap aspek kehidupan sosial, budaya, dan politik, bahkan melibatkan semua bentuk subjek (Sarup, 2004: 127). Artinya, kekuasaan tidak dimaknai secara struktural, tetapi menyebar di setiap relasi antarsubjek.

Konskuensi dari pemahaman ini adalah menjelaskan hubungan antarsubjek yang hadir dari kedua cerpen tersebut, tidak menjadi representasi atas kekuasaan negara saja, tetapi tersebar menjadi berbagai kekuasaan yang awalnya terkesan tidak hadir. Pembacaan terhadap relasi ini dibatasi pada komponen subjek yang awalnya menjadi representasi negara dan subjek yang terdominasi oleh

negara saja, dengan maksud agar memfokuskan pembahasan. Dalam konteks ini, pembacaan cerpen “Godlob” bisa menciptakan relasi kekuasaan orangtua–anak muda, sedangkan dalam cerpen “Clara” bisa menciptakan relasi kekuasaan laki-laki–perempuan dan Pribumi–Tionghoa.

Relasi Antarsubjek dalam “Godlob”

Dalam cerpen “Godlob”, relasi di luar negara masih tetap saja hadir meskipun sifatnya relatif lebih sedikit dibandingkan relasi dari cerpen “Clara”. Hal ini membuktikan, keterpecahan subjek di era Orde Baru masih bersifat minim dibandingkan keterpecahan subjek di era Reformasi. Dalam pembacaan peneliti, hanya satu relasi yang dimungkinkan hadir dalam cerpen “Godlob” antara ayah dan anak, yaitu relasi orang tua–anak muda.

Dalam cerpen ini, otoritas sang ayah, sebagai orang yang wajib dihormati dan segala keinginannya harus dipenuhi, menciptakan relasi lain di luar negara, yaitu relasi orang tua–anak muda. Relasi ini mengkultuskan bahwa apa yang diungkapkan orang tua, apa yang dipikirkan orang tua, dan apa yang dilakukan orang tua adalah kebenaran yang wajib diikuti. Dia menjadi kebenaran mutlak, termasuk di dalamnya keinginan untuk membunuh, dengan dalih ingin menjadikan sang anak sebagai pahlawan.

Kemutlakan kebenaran yang diyakini menjadi poin penting. Dalam cerpen ini dijelaskan, meskipun sang anak memiliki andil untuk ikut menasehati, tapi terkesan tidak didengarkan oleh sang ayah. Dalam konteks ini, sang ayah merasa memiliki pengalaman yang lebih panjang, sehingga dia merasa benar dibandingkan pendapat sang anak. Maka, jelaslah relasi yang muncul adalah relasi dominatif.

“Ayah! Apakah Ayah tidak bisa melihat hikmah yang terkandung dalam semua kejadian ini?”

“Tidak! Aku tidak melihatnya, sebab di situ memang tidak ada apa-apa” (Danarto, 2004).

Relasi Antarsubjek dalam “Clara”

Menurut peneliti, minimal ada dua relasi kekuasaan yang muncul dari cerpen “Clara”, jika mengacu pada tokoh polisi dan Clara, yaitu relasi laki-laki–perempuan dan relasi Pribumi–Tionghoa.

Deskripsi tokoh Clara sebagai korban pemerkosaan, sehingga meminta perlindungan tokoh “aku” yang diintrepetasi sebagai polisi, menyakinkan kita bahwa ada relasi kekuasaan. Tokoh aku memang bisa menjadi rujukan karena dia menjadi representasi negara yang bertugas “mengamankan”, tetapi relasinya berubah ketika tokoh aku yang berkelamin laki-laki juga mengalami gejala nafsu yang sama, sehingga berkeinginan juga untuk memperkosakan tokoh Clara. Istilah memperkosakan tentu berkonotasi pada kekuasaan, tetapi tidak mengacu kepada negara. Relasi yang paling tepat untuk peristiwa ini adalah relasi kekuasaan laki-laki yang dominatif terhadap perempuan. Adanya konstruksi bahwa laki-laki itu kuat, sedangkan perempuan itu lemah lembut (membutuhkan pertolongan) adalah konstruksi yang sejak awal memproduksi proses dominasi ini (Fakih, 2008:10).

Sementara itu, dalam kaitannya dengan relasi Pribumi-Tionghoa, sudah sejak lama diketahui terjadi suatu sentimen negatif dari masyarakat yang mengaku asli Indonesia, terhadap etnis pendatang dari Tionghoa. Sejak era Kolonialisasi Belanda yang melampaui 300 tahun, etnis pendatang ini seakan diberikan posisi yang lebih tinggi derajatnya ketimbang *inderland* sendiri. Dalam sistem tersebut, pribumi diposisikan sebagai kasta terendah, setelah penduduk dengan latar belakang “ras kulit putih” dan kaum migran dari Asia Timur, misalnya Cina dan Jepang (Faruk, 2007: 9).

Weeraratne (2009: 19) dalam jurnalnya mengatakan bahwa terdapat kemungkinan terjadi kecemburuan ekonomi, faktor keyakinan, dan rasial dalam kasus ini. Konsep *scapegoating* atau pengkambinghitaman juga dapat diterapkan dalam kasus pemerkosaan dan kekerasan terhadap etnis Tionghoa pada Mei 1998 ini. Dalam situasi krisis nasional, masyarakat secara

otomatis akan mencari kelompok yang dapat mereka salahkan dan menjadikannya tempat amukan atau kemarahan, hal ini dipahami sebagai pengkambinghitaman atau *scapegoating*.

Berdasarkan pendapat mayoritas masyarakat, etnis Tionghoa yang secara ekonomi menduduki posisi strategis dan memiliki keyakinan berbeda, secara tidak beruntung dijadikan sebagai ‘*dislike minority*’ (Weeraratne, 2009:21). Kondisi inilah yang menjadikan mereka target utama dari kerusuhan tersebut.

Hal ini juga terlihat dalam relasi tokoh polisi dan Clara dalam cerpen “Clara”. Tokoh polisi sejak awal terlihat tidak menyukai Clara karena atribut-atribut tertentu yang sejak awal menjadi doktrin. Ruang doktrin tersebut tidak hanya terjadi karena dilegitimasi negara, tetapi ada ruang kultural-historis yang juga mempengaruhinya, sehingga relasi yang muncul tetap dominatif. Hal ini bisa dianalisis dari teks berikut.

“Aku memang punya sentimen kepada orang-orang kaya–apalagi kalau dia Cina. Aku benci sekali. Yeah. Kainnya melorot, dan tampaklah bahunya yang putih.... “ (Ajidarma, 1998).

“Di hadapanku duduk wanita itu. Rambutnya dicat merah. Coklat sebetulnya. Tapi orang-orang menyebutnya merah. Padahal merah punya arti lain bagiku. Sudah bertahun-tahun aku dicekoki pikiran bahwa orang-orang merah adalah orang-orang yang berbahaya” (Ajidarma, 1998).

Kesimpulan

Dari analisis tersebut, telah terjadi pergeseran kekuasaan dari “yang dominan negara” ke “yang dominan subjek”, dari era Orde Baru ke era Reformasi. Hal ini dapat dianalisis dari cerpen “Godlob” sebagai representasi Orde Baru dan cerpen “Clara” sebagai representasi Reformasi.

Hasil analisis itu dapat dilihat dari cerpen “Godlob” dan “Clara” yang diyakini memiliki persegeran pola kekuasaan. Pergeseran pola inilah yang menarik untuk dikaji. Beberapa

pola pergeseran kekuasaan yang sangat terlihat dalam kedua cerpen tersebut, minimal ada dua perspektif, yaitu pergeseran instrumen hegemoni negara dan pergeseran relasi antarsubjek.

Dalam konteks pergeseran instrumen hegemoni negara dalam cerpen “Godlob” dan “Clara”, gagasan tentang Militerisme dan Birokrasi, sangat kental sekali hadir dalam mempengaruhi persepsi tentang pandangan dunia dalam konteks hegemoni negara. Wacana negara tentang kepahlawanan menjadi poin penting. Pahlawan ditafsirkan hanya sebagai tentara yang meninggal di medan pertempuran. Ini jelas menjadi ruang bagi pengukuhan hegemoni negara terutama era Orde Baru yang memposisikan militer/tentara sebagai simbol kekuasaan. Kondisi ini berbeda dengan cerpen “Clara”, yang merupakan representasi era Reformasi. Dalam cerpen “Clara”, relasi kekuasaan yang muncul justru sebaliknya. Militer tidak ditafsirkan sebagai wajah yang dominan, tetapi justru mengalami proses reduksi kekuasaan.

Dalam konteks lembaga negara, muncul kritik terhadap lembaga negara dalam cerpen “Godlob”. Namun, kritik yang dilakukan masih bersifat kritik, bukan autokritik, yaitu kritik yang masih dilakukan oleh pihak luar terhadap lembaga tersebut. Meski demikian, akibat kritik tersebut laki-laki itu harus menerima kenyataan, yaitu mati terbunuh di tangan istrinya sendiri. Proses ini sedikit berbeda ketika kita menghadirkan cerpen “Clara” sebagai pembanding. Dalam cerpen ini, kita justru melihat proses autokritik hadir. Polisi yang seharusnya memperkuat kekuasaannya melalui hegemoninya, justru terpecah melalui autokritiknya.

Lebih lanjut, Foucault menjelaskan bahwa pola hubungan kekuasaan bersifat diferensial yang kompleks. Dirinya meluas ke setiap aspek kehidupan sosial, budaya, dan politik, bahkan melibatkan semua bentuk subjek. Artinya, kekuasaan tidak dimaknai secara struktural, tetapi menyebar di setiap relasi antarsubjek. Konskuensi dari pemahaman ini adalah menjelaskan hubungan antarsubjek yang hadir dari kedua cerpen tersebut, tidak

menjadi representasi atas kekuasaan negara saja, tetapi tersebar menjadi berbagai kekuasaan yang awalnya terkesan tidak hadir. Pembacaan terhadap relasi ini dibatasi pada komponen subjek yang awalnya menjadi representasi negara dan subjek yang terdominasi oleh negara saja, dengan maksud agar memfokuskan pembahasan.

Dalam konteks ini, cerpen “Godlob” bisa menciptakan relasi kekuasaan orangtua-anak muda, sedangkan cerpen “Clara” bisa menciptakan relasi kekuasaan laki-laki-perempuan dan Pribumi-Tionghoa. Dari fakta itu terlihat jelas bahwa dalam cerpen “Godlob”, relasi di luar negara masih tetap saja hadir meskipun sifatnya relatif lebih sedikit dibandingkan relasi dari cerpen “Clara”. Hal ini membuktikan bahwa keterpecahan subjek di era Orde Baru masih bersifat minim dibandingkan keterpecahan subjek di era Reformasi.

Daftar Pustaka

- Bellamy, Richard. 1990. *“Antonio Gramsci” Teori Sosial Modern: Perspektif Italia*. Jakarta: LP3ES
- Budiman, Arif. *“Sastra (dan) Ideologi: Sebuah Tinjauan Teoritis”* dalam Basis No.6 Bulan Juni 1995-XLIV. Yogyakarta.
- Fakih, Mansur. 2005. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist
- Faruk. 2005. *Pengantar Sosiologi Sastra*. Cetakan ke-4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2007. *Belenggu Pasca-kolonial: Hegemoni dan Resistensi Sastra Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kleden, Ignas. 2004. *Sastra Indonesia dalam nam Pertanyaan: Esai-esai Sastra dan Budaya*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Patria, Nezar dan Andi Arief. 2003. *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salamini, Leonardo dan Mikhail Liftchitz. 2004. *Praksis Seni: Mark dan Gramsci* (terj) Ari Widjojo. Yogyakarta: Alinea.
- Sarup, Madan. 2003. *Posstrukturalisme dan Posmodernisme: Sebuah Pengantar* (terj) Medhy Aginta Hidayat. Yogyakarta:

Jendela.

Simon, Roger. 2004. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci* (Terj) Kamdani dan Imam Baehaqi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sinaga, Martin Lukito. 2004. *Identitas Poskolonial "Gereja Suku" dalam Masyarakat Sipil: Studi tentang Jaulung Wismar Saragih dan Komunitas Kristen Simalungun*. Yogyakarta: Lkis.

Weeraratne, Suranjan. 2009. *Degrees of Scapegoatability: Accesing Spatial Variations in Collective Violence against the Ethnic Chinese in Indonesia*. Montreal: McGill University.